

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus, Dwiyanto, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.
- Ali, Achmad *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta : Ghal ia Indonesia.2002).
- Black, Henry Campbell, *Black'S Law Dictionary*, (West Publishing, 1990).
- Echols, John M. dan Hassan Shadilly, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Fadhilla, Putra, 2012, *New Public Governance*. (Malang:UB Press.).
- Friedman, Lawrence M., *American Law an Introduction*, ( New York : W.W North and Company.1989)
- Fuadi, Munir, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti.2003).
- Hadjon, Philipus M., dalam Malik, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 1997).
- Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum*. Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 11-12 Juni 1997.
- Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, No. 5&6 Tahun XII, Sep-Des, 1997.
- Halim, Hamzah dan Putera, Kemra, Kemal Redino Syahrul, *Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009).
- Kurniawan, Mahendra, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet Keempat, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001).

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada.
- Ruslan, Achmad, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Ruslan, Achmad, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tangerang, Rangkang Education
- Savas, E.S. 1987, "*Privatization: The Key to Better Government*", New Jersey: Chatam House Publisher.
- Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007).
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,(Bandung: Remadja Karya, 1985).
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI PRES: 1986).
- Suriadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: Reifika Aditama.
- Wastitiono, Sadu, *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Algraprint, 1997).
- Weber, Max dalam A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Wibowo, Sulostiyo, Skripsi : *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret:2009).

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.

## **Jurnal**

Hasrul, Muh (2017), *“Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”*, Amanna Gappa, 25 (2): 64.

Wulan, Astried, (2015), *Komunikasi Penyuluhan Administrasi Kependudukan terhadap Pemahaman UU No. 24 Tahun 2003*, Medan: Fakultas Hukum Program Magister, Universitas Sumatera Utara.

Razak, Abdul, (2013), *Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Presfektif Otonomi Daerah*,. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 21 (1); 7.

Ruslan, Achmad, (2013), *Peraturan Daerah dan HAM dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 2 (4); 272.

## **Sumber internet**

Albar, Muh Azis, *Warga Keluhkan Layanan Disdukcapil Enrekang, Begini Curhatnya (Selasa, 21 November 2017: 14.51)*, diakses dari TribunEnrekang.com, pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 14.57.

Albar, Muh Azis, *20 Ribu Warga Enrekang Belum Miliki e-KTP (Jumat 24 Agustus 2018: 11.51)*, diakses dari TribunEnrekang.com, pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 09.01.

Albar, Muh Azis, *Data Disdukcapil Enrekang, 30 Ribu Warga Belum Rekam e-KTP, 20 Ribu Data Ganda (27 November 2017: 15.47)*, diakses dari TribunEnrekang.com, pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 15.40.

Setyawan, David, *Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945*, diakses dari [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), diakses pada tanggal 9 Agustus 2019 pukul 11.07.